

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada era globalisasi sekarang ini memerlukan dana yang cukup besar dan tambahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Disadari bahwa investasi yang bersumber dari dalam negeri tidak cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran investasi asing guna mendampingi investasi dalam negeri guna mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, investasi asing akan mencari negara-negara yang mempunyai daya tarik yang tinggi ditinjau dari infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif, penegakan hukum, transparansi di pasar modal, stabilitas keamanan dan politik menjadi pertimbangan bagi kehadiran investasi swasta (Dumairy,1996:142).

Seiring dengan arus globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisasi arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Bangsa Indonesia juga dihadapkan pada penyelenggaraan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat sendiri, Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di samping itu, daerah dituntut untuk dapat mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dalam pembangunan perekonomian daerah, maka setiap daerah berupaya menciptakan iklim perekonomian yang kondusif untuk meningkatkan investasi, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global, termasuk bagi BUMN/BUMD yang berada di daerah, Sebagaimana disebutkan Mardiasmo (2002:68) bahwa:

Dalam menghadapi otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian peranan investasi swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth and center of economic activities*), serta *multiplier effect* yang besar.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, maka daerah diberikan kewenangan untuk menangani seluruh bidang dalam pemerintahan *kecuali*, kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang telah diatur dalam undang-undang. Namun seperti disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa ada beberapa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal. Jadi jelas bahwa penanaman modal merupakan bidang pemerintahan yang wajib ditangani oleh pemerintah daerah.

Adanya desentralisasi sebenarnya juga menimbulkan dilema bagi daerah, khususnya berkaitan dengan investasi. Di satu sisi daerah dituntut untuk pandai-pandai menggali pendapatan daerah, Sedangkan di sisi lain daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk meningkatkan investasi, Salah satunya melalui pemberian insentif bagi investor. Jadi dengan adanya desentralisasi juga menimbulkan ketakutan bagi calon investor karena akan semakin banyak pos pungutan dan retribusi yang diatur dalam perda setiap daerah kabupaten/kota, sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan tingkat investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengambil kebijakan yang paling tepat untuk meningkatkan investasi dan masukan bagi peningkatan PAD dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam hal ini, pembentukan modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi baik modal material maupun tenaga kerja. Untuk itu setiap negara memerlukan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Pembentukan modal menjadi suatu masalah yang cukup berarti bagi negara sedang berkembang, karena salah satu ciri negara sedang berkembang adalah tingkat pendapatan rendah. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan juga rendah. Dengan tabungan yang rendah maka tingkat investasi pun rendah.

Pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan pendapatan negara, untuk itu diperlukan dukungan modal swasta, baik itu swasta dalam negeri maupun swasta asing.

Walaupun tumbuhnya investasi dalam pembangunan ekonomi nasional sangat diharapkan, namun pemerintah juga harus mengantisipasi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh masuknya investasi asing (swasta) dalam perekonomian nasional, baik bagi BUMN dan BUMD, agar tidak terganggu oleh dominasi asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi, baik di sektor swasta maupun di sektor negara.

Hal ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan investasi swasta.

Melihat pentingnya peranan penanaman modal dalam pembangunan ekonomi, maka kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia juga diarahkan pada peningkatan peranan pemerintah dalam meningkatkan investasi, Sebagaimana disebutkan dalam GBHN 1999-2004, bahwa:

“Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan pada peningkatan peranan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinir dan sinergis, mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhitungkan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi”.

Iklim investasi Indonesia juga diwarnai dengan kualitas pelayanan aparatur yang masih rendah. Masih banyak terjadi pungutan liar di seputar lingkungan usaha yang dilakukan sekelompok orang atas nama organisasi masyarakat. Selain itu, pelayanan yang lebih baik diberikan kepada kalangan usaha yang mampu membayar biaya perijinan lebih besar dibanding kelompok yang kurang mampu, hal ini juga disebabkan karena tidak ada penetapan biaya yang jelas dan pasti. Hambatan lain,

yang juga dapat menghambat iklim investasi di daerah adalah banyaknya peraturan yang tidak sinkron dan saling berbenturan satu dengan lainnya.

Dalam usaha mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, maka pada tanggal 27 Februari 2011 di Istana Negara. Presiden RI mencanangkan tahun 2011 sebagai Tahun Investasi (Kompas 28 Februari 2011). Dengan pencanangan tahun investasi ini diharapkan tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan kemitraan seluruh masyarakat akan arti pentingnya investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pemulihan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menciptakan membenahi berbagai hal yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten Malang untuk perencanaan pembangunan Tahun 2012 bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang dalam mengatasi isu pembangunan, terutama dalam percepatan proses pemulihan ekonomi daerah. Peningkatan investasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai usaha dalam memenuhi tambahan sumber- sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang menjadi incaran para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya karena Kabupaten Malang dipandang sebagai daerah yang mempunyai potensi investasi yang cukup tinggi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, maupun pariwisata, dimana telah dibuktikan dengan banyaknya proyek

investasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Malang, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), seperti masuknya Penanaman Modal Asing dari Amerika, Jerman, Jepang dan Singapura.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Kabupaten Malang masih mengalami kesulitan dalam mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, karena masih ditemukan kendala-kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dari politik, perekonomian dan juga faktor hukum yang sangat mempengaruhi iklim penanaman modal di suatu daerah. Selain itu, Kabupaten Malang belum mempunyai kawasan industri tersendiri yang menyebabkan investor kurang tertarik dan proses perijinan yang panjang dan memerlukan waktu yang lama karena proses perijinan penanaman modal di Kabupaten Malang yang masih belum menggunakan sistem perijinan satu atap dalam proses perijinannya.

Keberadaan Kabupaten Malang yang strategis, didukung oleh potensi daerah yang besar namun banyak yang belum tergali dan dimanfaatkan tersebut, maka diperlukan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya, serta berupaya mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini masih ada dalam menangani investasi, seperti dalam memberikan jaminan kepastian pelaksanaan investasi yang telah disetujui dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung dan mewujudkan iklim usaha investasi yang kondusif, mengharapkan kerjasama yang baik dari semua komponen, yaitu ([www.kabmalang.go.id](http://www.kabmalang.go.id)):

- a. Pemerintah lebih kreatif, aktif dan berani dalam memberikan insentif, termasuk perpajakan bagi investor baik negeri maupun asing. Apalagi insentif yang diberikan Negara dan Kota/Kabupaten lain untuk meningkatkan investasinya juga sangat memikat calon investor.
- b. Anggota Legislatif, menciptakan *entrepreneurial government* melalui penerbitan peraturan yang bersahabat dengan investor dan dunia usaha. Selain itu, diharapkan dapat lebih memberdayakan dan memotivasi masyarakat pada usaha-usaha produktif dan dan berwawasan wirausaha, sehingga akan bermanfaat pada penciptaan lapangan pekerjaan.
- c. Masyarakat ( pemuda, LSM, pekerja, tokoh-tokoh masyarakat), untuk ikut berperan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban terutama menghadapi resiko sosial politik, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga serta terus meningkat. Diharapkan seluruh masyarakat dapat bersikap ramah dan menjaga hubungan baik terhadap investor, karena mengingat investor adalah mitra kita .

Dengan demikian, iklim investasi dan stabilitas ekonomi yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Malang. Pada akhirnya nanti, dengan kegiatan investasi akan menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, dapat di rumuskan beberapa masalah yang merupakan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Malang yang dapat mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana usaha Pemerintah Daerah meningkatkan investasi untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan investasi yang terjadi di Kabupaten Malang serta menganalisa prospek investasi tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan usaha pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan investasi.
3. Menganalisa faktor pendukung dan penghambat investasi swasta yang ada di Kabupaten Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara akademis**

a. Dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan secara khusus peneliti dan secara umum kepada pembaca.

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang Administrasi Pembangunan dalam hal penanaman modal.

### **2. Secara praktis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menangani bidang penanaman modal terutama berkaitan dengan usaha peningkatan investasi di daerah dimana investasi mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi.

**E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disajikan dengan maksud untuk dapat mengetahui garis besar mengenai apa yang diuraikan dalam skripsi ini. Secara garis besar isi dan susunan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Diuraikan mengenai latar belakang mengenai potensi investasi Kabupaten Malang yang cukup besar namun sampai sekarang masih belum tergarap dengan maksimal. Sehingga jumlah investasi Kabupaten Malang bisa dikatakan masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, hal ini disebabkan karena dalam pengurusan perijinan untuk investasi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Kabupaten Malang juga belum memiliki kawasan industri. Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana usaha pemerintah daerah Kabupaten meningkatkan investasi dalam mendukung desentralisasi di Kabupaten Malang. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan investasi yang terjadi di Kabupaten Malang, menganalisa faktor pendukung dan penghambat investasi yang ada di Kabupaten Malang dalam meningkatkan investasi. Sedangkan manfaat penelitian ini sendiri terbagi menjadi 2 manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi acuan atau landasan dalam analisa dan pembahasan nantinya, yang meliputi Pengertian investasi, Pentingnya Pembentukan modal dalam Pembangunan, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah dan Investasi, faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Langkah-langkah untuk mendorong investasi asing.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian berisikan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian akan mengkaji mengenai gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang meliputi sektor-sektor unggulan seperti potensi perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan pertambangan, kerajinan, pariwisata dan industri serta perkembangan investasi di Kabupaten Malang, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam usaha peningkatan investasi di Kabupaten Malang serta usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan penanaman modal dan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Malang karena merupakan daerah yang memiliki potensi yang tinggi untuk melaksanakan penanaman modal dan situs penelitian sendiri mengambil tempat di Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di KPM dan investor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini analisis dan interaktif. Aktivitas analisis data meliputi reduksi data; penyajian data; serta menarik kesimpulan.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini disajikan mengenai data-data dari hasil penelitian dan analisa serta pembahasan tentang potensi-potensi investasi di Kabupaten Malang, perkembangan investasi di kabupaten Malang, faktor penghambat investasi dan usaha pemerintah daerah meningkatkan Investasi di Kabupaten Malang.

**BAB V: PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam usaha peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) .